BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum tentang Manajemen Logistik Obat-Obatan

2.1.1 Pengertian Manajemen

Menurut Siagian (2009), manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Istilah logistik bersumber dari ilmu kemiliteran yang mengandung 2 aspek yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Termasuk perangkat lunak adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan dalam lingkup kegiatan-kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, distribusi, evaluasi termasuk konstruksi. Sedangkan yang dimaksud perangkat keras adalah personil, persediaan dan peralatan (Mahmud, 2015).

The Liang Gie dalam Mawaddah (2016) menjelaskan Manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian perbuatan menggerakkan karyawan-karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai. Adapun fungsi-fungsi Manajemen menurut George Terry (Mawaddah, 2016):

2.1.1.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.

2.1.1.2 Pengorganisasian (*Organization*)

Pengorganisasian sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.

2.1.1.3 Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan yaitu untuk menggerakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.

2.1.1.4 Pengawasan (*Controlling*)

Pengawasan yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

2.1.2 Pengertian Logistik

Logistik adalah suatu ilmu mengenai pengadaan, pemeliharaan dan penyediaan transportasi termasuk pelayanan persediaan dalam jumlah yang sangat besar kepada banyak orang ditempat-tempat yang jaraknya berjauhan. Dalam suplai mencakup semua aspek produsen, penyalur ke apotek, toko obat dan sampai pada penggunaan obat dalam hal ini adalah pasien bersangkutan. Menurut Aditama (2003) dalam Badaruddin (2015), kegiatan logistik secara umum ada 3 (Tiga) tujuan yakni:

2.1.2.1 Tujuan operasional adalah agar supaya tersedia barang serta bahan dalam jumlah yang tepat dan mutu yang memadai.

2.1.2.2 Tujuan keuangan meliputi pengertian bahwa upaya tujuan operasional dapat terlaksanakan dengan biaya yang serendah-rendahnya.

2.1.2.3 Tujuan pengamanan dimaksudkan agar persediaan tidak terganggu oleh kerusakan, pemborosan, penggunaan tanpa hak, pencurian dan penyusutan yang tidak wajar lainnya, serta nilai yang sesungguhnya dapat tercermin di dalam sistem akuntansi.

Menurut Seto (2004) Kegiatan logistik di Fasilitas Kesehatan dilakukan berdasarkan siklus yang berlangsung terus menerus secara berkesinambungan untuk kepentingan produksi jaya pelayanan kesehatan yang bermutu. Fungsi-fungsi tersebut tergambar dalam suatu siklus manajemen logistik yang satu sama lain saling berkaitan dan sangat menentukan keberhasilan kegiatan logistik dalam organisasi.

Bagan 2.1 Pengelolaan Persediaan Obat Menurut Depkes RI, 2008

Sukses dan gagalnya pengelolaan logistik ditentukan oleh kegiatan di dalam siklus tersebut yang paling lemah. Apabila lemah dalam perencanaan, misalnya dalam penentuan suatu item barang yang seharusnya kebutuhannya di dalam satu periode (misalnya 1 tahun) sebesar kurang lebih 1.000 unit, tetapi direncanakan sebesar 10.000 unit. Akibatnya akan mengacaukan suatu siklus manajemen logistik secara keseluruhan mulai dari pemborosan dalam penganggaran, membengkaknya biaya pengadaan dan penyimpanan, tidak tersalurkannya obat atau barang tersebut sehingga barang bisa rusak, kadaluarsa yang bagaimanapun baiknya pemeliharaan di

gudang, tidak akan membantu sehingga perlu dilakukan penghapusan yang berarti kerugian (Pebrianti, 2015). Oleh sebab harus dilakukan pengendalian pada setiap fungsi tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tatakelola obat publik dan perbekalan kesehatan (Permenkes, 2016). Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 2.1.2.1 Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.
- 2.1.2.2 Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.
- 2.1.2.3 Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.
- 2.1.2.4 Penyiapan pemberian bimbingan teknis di bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.

2.1.2.5 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan penilaian ketersediaan, pengendalian harga dan pengaturan pengadaan, serta pengendalian dan pemantauan pasar obat publik dan perbekalan kesehatan.

2.1.2.6 Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

2.1.3 Pengertian Obat

Menurut Permenkes Republik Indonesia No.73 Tahun 2016 Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan, dan kontrasepsi untuk manusia (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016).

Obat adalah benda yang biasa difungsikan untuk merawat penyakit, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh masing-masing. Obat merupakan zat yang digunakan untuk diagnosis, mengurangi rasa sakit dan mengobati atau mencegah penyakit yang terjadi atau dialami oleh manusia maupun hewan (Nurul, 2017).

2.1.4 Instalasi Farmasi

Menurut Permenkes No.3 Tahun 2015 Instalasi Farmasi Pemerintah adalah sarana tempat menyimpan dan menyalurkan sediaan farmasi dan alat kesehatan milik Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan, yang dalam Undang-Undang mengenai Narkotika dan Psikotropika disebut Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah. (Permenkes RI, 2015).

Instalasi Farmasi adalah unit pelaksanaan Teknis dari Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas merencanakan, menerima, menyimpan, pendistribusian dan pemeliharaan barang, persediaan obat, alat kesehatan lainnya yang digunakan untuk melaksanakan program

kesehatan (*Japan International Cooperation Agency (JICA)* dan *Kemenkes RI, 2010*). Tujuan Instalasi Farmasi yaitu untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian yang bermutu dalam rangka mewujudkan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan baik kualitas maupun kuantitas pada Instalasi Farmasi Kabupaten (*Depkes RI, 2007*).

2.2 Tinjauan tentang Pengelolaan Instalasi Farmasi

2.2.1 Pengelolaan Instalasi Farmasi

Pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pencatatan, pelaporan dan pemusnahan serta monitoring dan evaluasi (*Kemenkes RI, 2010*). Pengelolaan perbekalan farmasi meliputi:

2.2.1.1 Perencanaan

Para ahli di bidang manajemen telah mengemukakan definisi atau pengertian tentang perencanaan, namun setiap pengertian perencanaan senantiasa memiliki batasan yang berbeda tergantung ahli manajemen yang mengemukakan. Perencanaan di bidang kesehatan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk merumuskan masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan sumber daya yang harus disediakan, menetapkan tujuan yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari batasan tersebut, perencanaan akan menjadi efektif jika sebelumnya dilakukan perumusan masalah berdasarkan fakta (*Hartono, 2007*). Menurut (*Azwar, 2010*) perencanaan menurut ilmu administrasi kesehatan terdapat 3 aspek pokok yang harus diperhatikan meliputi:

- a. Hasil kerja perencanaan (*outcome of planning*).
- b. Perangkat perencanaan (*mechanic of planning*).

c. Proses perencanaan (*proces of planning*).

Menurut Handoko (2009) perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Febriawati (2013) mengemukakan bahwa perencanaan adalah proses untuk merumuskan sasaran dan menentukan langkah langkah yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Handoko (2009) mengungkapkan bahwa salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan (*decision making*), proses pengembangan dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Perencanaan adalah pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang. Sedangkan rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi setiap rencana mengandung unsur tujuan dan pedoman. (Hasibuan, 2011).

Anshari (2009) mengungkapkan bahwa perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menetapkan diawal berbagai hasil akhir (*end result*) yang ingin dicapai perusahaan di masa yang akan datang. Antara kegiatan perencanaan dengan hasil akhir yang ingin dicapai diasumsikan terdapat jeda waktu (*time lag*), dimana semakin panjang rencana yang dibuat maka jeda waktu antara perencanaan dengan hasil akhir yang ingin dicapai semakin besar dan derajat kepastian pencapaian hasil tersebut juga semakin meningkat.

Sebaliknya, semakin pendek jeda waktu antara perencanaan yang dibuat dengan target hasil yang ingin dicapai maka derajat kepastian pencapaian hasil akan menurun (Solihin, 2009).

a. Tahapan Perencanaan

Perencanaan pada dasarnya memiliki tahapan. Tahapan perencanaan menurut Handoko (2009) yaitu:

1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan kerja yang jelas organisasi akan menggunakan sumber daya sumber dayanya secara tidak efektif.
2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya sumber daya yang tersedia untuk pencapaian tujuan, adalah sangat penting, karena tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan datang.
3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu diketahui faktor faktor lingkungan *intern* dan *ekstern* yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang menimbulkan masalah.
4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan,

penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik (paling memuaskan) diantara berbagai alternatif yang ada.

Muninjaya (2004) berpendapat ada lima langkah yang perlu dilakukan pada proses penyusunan sebuah perencanaan kesehatan yaitu:

1. Analisis situasi

Analisis situasi adalah langkah pertama proses penyusunan perencanaan. Langkah ini dilakukan dengan analisis data laporan yang dimiliki oleh organisasi (data primer) atau mengkaji laporan lembaga lain (data sekunder) yang datanya dibutuhkan, observasi dan wawancara.

2. Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya

Melalui analisis situasi akan dihasilkan berbagai macam data. Data dianalisis lebih lanjut menggunakan pendekatan epidemiologi untuk dapat dijadikan informasi tentang distribusinya disuatu wilayah. Setelah masalah kesehatan masyarakat ditetapkan menjadi prioritas di suatu wilayah, selanjutnya ditetapkan tujuan programnya.

3. Menentukan tujuan program

Setelah masalah kesehatan ditetapkan, manajer program menetapkan tujuan program. Perumusan sebuah tujuan operasional program kesehatan harus bersifat SMART (*specific, measurable, appropriate, realistic, time bound*).

4. Mengkaji hambatan dan kelemahan program

Langkah keempat proses penyusunan adalah mengkaji kembali hambatan dan kelemahan program yang pernah dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk

mencegah atau mewaspadaai timbulnya hambatan serupa. Selain mengkaji hambatan yang pernah dialami, juga dibahas prediksi kendala dan hambatan yang mungkin akan terjadi dilapangan pada saat program dilakukan.

5. Menyusun rencana kerja operasional (RKO)

Pada saat memasuki fase ini tim perencana sudah menetapkan tujuan dan target yang ingin dicapai.

b. Maksud Perencanaan (*Purpose of Planning*)

Salah satu maksud utama perencanaan adalah melihat bahwa program-program dan penemuan sekarang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan-tujuan di waktu yang akan datang yaitu meningkatkan pembuatan keputusan yang lebih baik. (Handoko, 2009). Hasibuan (2011) mengungkapkan bahwa maksud dari suatu perencanaan antara lain adalah:

1. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajer yang meliputi seleksi atas alternatif alternatif tujuan, kebijaksanaan, prosedur dan program.
2. Perencanaan, sebagian merupakan usaha membuat hal-hal terjadi sebagaimana yang dikehendaki.
3. Perencanaan adalah suatu proses pemikiran, penentuan tindakan tindakan secara sadar berdasarkan keputusan menyangkut tujuan, fakta dan ramalan.
4. Perencanaan adalah usaha menghindari kekosongan tugas, tumpang tindih dan meningkatkan efektivitas potensi yang dimiliki. Perencanaan organisasi harus aktif, dinamis, berkesinambungan dan kreatif.

c. Tujuan Perencanaan (*Objective of Planning*)

Menurut Handoko (2009) ada dua alasan dasar perlunya perencanaan yaitu:

1. *Protective benefits* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan.
2. *Positive benefits* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi.

Tujuan dari perencanaan secara objektif di kemukakan oleh Hasibuan (2011) antara lain:

1. Perencanaan bertujuan untuk menentukan tujuan, seleksi atas alternatif alternatif tujuan, kebijakan kebijakan, prosedur dan program serta memberikan pedoman cara-cara pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk memperkecil resiko yang dihadapi pada masa yang akan datang.
3. Perencanaan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara teratur dan bertujuan.
4. Perencanaan memberikan gambaran yang jelas dan lengkap tentang seluruh pekerjaan.
5. Perencanaan membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja.
6. Perencanaan membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi.

d. Manfaat perencanaan (*Purpose of Planning*)

Manfaat perencanaan akan lebih terencana, terarah, efektif dan efisien karena dapat mengurangi suatu pekerjaan yang tidak perlu. Suatu perencanaan yang baik juga memerlukan dana mulai dari dana survey awal, pengumpulan data hingga pelaksanaan.(Hartono, 2007).

Menurut Muninjaya (2004) mengungkapkan bahwa perencanaan terdapat manfaat, keuntungan dan kerugian yang dapat diperoleh suatu organisasi. Manfaat perencanaan adalah diketahui tujuan yang ingin dicapai, cara mencapainya, jenis, struktur yang dibutuhkan, dan bentuk serta standar yang dibutuhkan.

Perencanaan mempunyai banyak manfaat antara lain membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah utama, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat, memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi, memudahkan dalam melakukan koordinasi diantara berbagai bagian dalam organisasi, membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan mudah dipahami, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti, menghemat waktu usaha dan dana. (Handoko, 2009).

Muninjaya (2004) mengungkapkan beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari perencanaan antara lain:

1. Perencanaan memberikan landasan pokok fungsi manajemen terutama pengawasan.
2. Perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif.
3. Perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai, karena dalam perencanaan ditetapkan berbagai standar.

4. Perencanaan dapat menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur.

Menurut Azwar (2010) untuk menilai keberhasilan dari sebuah rencana dikelompokkan dalam tiga macam yaitu:

1. Kriteria keberhasilan unsur masukan yakni menunjuk pada terpenuhinya unsur masukan, misalnya tersedianya tenaga, dana dan sarana sesuai dengan rencana.
2. Kriteria unsur proses yakni menunjuk pada terlaksananya unsur proses.
3. Kriteria keberhasilan unsur keluaran yakni menunjuk pada tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan adalah salah satu fungsi yang menentukan dalam proses pengadaan farmasi di Gudang Farmasi yang bertujuan agar tidak terjadi kesinambungan antara permintaan dan distribusi, sehingga distribusi obat berjalan lancar dari pihak gudang farmasi ke pihak yang membutuhkan serta menghindari terjadinya *stock out* (kekosongan) obat (Kemenkes RI. 2010).

Ada beberapa metode perencanaan, yaitu:

1. Metode Epidemiologi

Metode Epidemiologi berdasarkan kebutuhan obat yang digunakan berdasarkan pada penyakit yang sering muncul dimasyarakat.

2. Metode Konsumsi

Metode Konsumsi berdasarkan pada kebutuhan obat pada periode lalu dengan penyesuaian dan koreksi berdasarkan pada penggunaan obat tahun sebelumnya.

3. Metode Kombinasi/Campuran

Metode Kombinasi berdasarkan metode konsumsi dan metode epidemiologi, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

2.2.1.2 Pengadaan

Pengadaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan perencanaan, yang bertujuan untuk memperoleh obat yang dibutuhkan dengan harga layak, mutu baik, pengiriman obat terjamin tepat waktu, proses berjalan lancar tidak memerlukan waktu dan tenaga yang berlebihan. Pengadaan dapat dilakukan melalui Tender Terbuka (*Open Tender*), Pembelian secara langsung dan sumbangan atau hibah (*droping*) (Kemenkes RI. 2010).

2.2.1.3 Penerimaan

Penerimaan merupakan kegiatan untuk menjamin kesesuaian jenis, spesifikasi, jumlah, mutu, waktu penyerahan dan harga yang tertera dalam kontrak atau surat pesanan dengan kondisi fisik yang diterima. Semua dokumen terkait penerimaan barang harus tersimpan dengan baik (Kemenkes RI. 2010).

2.2.1.4 Penyimpanan

Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dan menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat dan dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Sistem penyimpanan berdasarkan Alfabeta, Farmakologis, Bentuk sediaan, *First in first out* (FIFO) dan *First expired first out* (FEFO) (Kemenkes RI. 2010).

2.2.1.5 Pendistribusian

Distribusi merupakan penyaluran/ menyerahkan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dari tempat penyimpanan sampai kepada unit pelayanan/pasien dengan tetap menjamin mutu, stabilitas, jenis, jumlah, dan ketetapan waktu (Kemenkes RI. 2010). Tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengiriman obat secara merata dan teratur sehingga dapat diperoleh pada saat dibutuhkan.
- b. Terjaminnya mutu obat dan perbekalan kesehatan pada saat pendistribusian.
- c. Terjamin kecukupan dan terpeliharanya penggunaan obat di unit pelayanan kesehatan.
- d. Terlaksananya pemerataan kecukupan obat sesuai kebutuhan pelayanan dan program kesehatan.

Kegiatan distribusi obat terdiri dari:

- a. Kegiatan distribusi rutin yang mencakup distribusi untuk kebutuhan pelayanan umum di unit pelayanan kesehatan.
- b. Kegiatan distribusi khusus yang mencakup distribusi obat untuk Program kesehatan, kejadian luar biasa (KLB).
- c. Bencana (alam dan sosial).

2.2.1.6 Pencatatan dan Pelaporan

Pencatatan dan pelaporan terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, baik sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai yang diterima, disimpan, didistribusikan dan digunakan di puskesmas atau unit pelayanan lainnya (Permenkes RI. 2017).

2.2.1.7 Pemusnahan

Pemusnahan adalah kegiatan penyelesaian terhadap perbekalan farmasi yang tidak terpakai karena kedaluwarsa, rusak, mutu tidak memenuhi standar dengan cara membuat usulan penghapusan perbekalan farmasi kepada pihak yang terkait sesuai dengan prosedur yang berlaku, (Depkes RI. 2008).